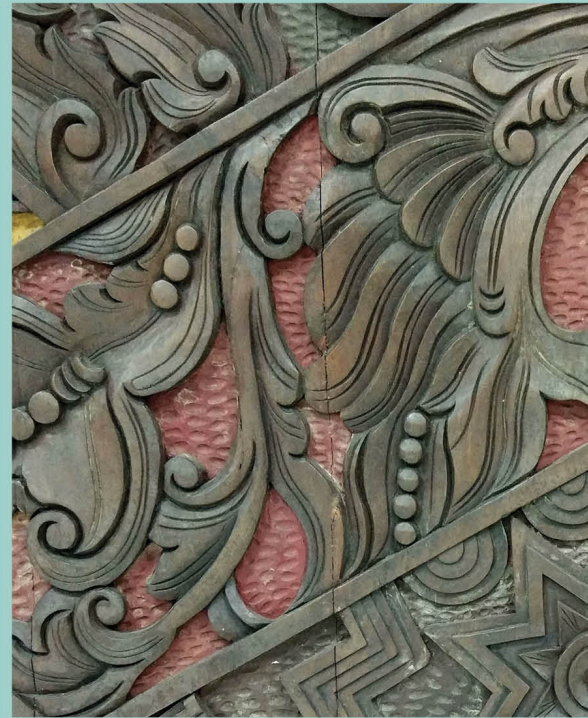


CSIS ELECTION SERIES No. 1




CENTRE FOR  
STRATEGIC AND  
INTERNATIONAL  
STUDIES

# Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas



ARYA FERNANDES



The CSIS Election Series is a means by which members of the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) research community can quickly disseminate their research findings and encourage exchanges of ideas on elections. The views expressed here are those of the author(s) and should not be attributed to CSIS Jakarta.

© 2018 Centre for Strategic and International Studies, Jakarta

# Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas

Oleh *Arya Fernandes*

## Executive Summary

1. Secara elektoral, politik identitas tidak mempunyai efek yang besar dalam Pemilu Presiden mendatang. Hampir dua tahun setelah digelarnya aksi 212, 2 Desember 2016, sampai saat ini tidak terjadi perubahan dukungan yang signifikan terhadap Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Suara Joko Widodo tidak mengalami penurunan setelah digelarnya aksi 212, begitu juga suara Prabowo Subianto yang mengalami stagnasi.
2. Pemilih di Indonesia pada dasarnya moderat dan pertimbangan pilihan dalam pemilu dipengaruhi oleh faktor pertimbangan terhadap kualitas personal dan kinerja calon dibandingkan dorongan politik keagamaan
3. Kesenjangan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang membelah konsentrasi elit dan pemilih serta pertarungan isu ekonomi antara kedua pasangan calon lebih banyak mewarnai diskursus kampanye di tingkat pemilih
4. Preferensi politik pendukung dan peserta massa Aksi 212 tidak homogen, namun tersebar ke sejumlah partai politik dan calon presiden. Dari sisi preferensi politik, baik Joko Widodo dan Prabowo Subianto mendapatkan suara dari pendukung massa aksi 212. Dari sisi partai, distribusi suara pendukung massa aksi 212 juga tersebar kepada partai berbasis nasionalis dan agama serta partai pendukung koalisi atau oposisi pemerintah

# Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas

Oleh Arya Fernandes

## Pengantar

Pemilu Presiden 2019 mendatang diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dicalonkan oleh PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura. Sementara, pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dicalonkan oleh Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Dua calon ini pernah bertarung pada pemilu presiden tahun 2014 lalu dengan selisih perolehan suara sebesar 6,3%. Saat itu, Joko Widodo mendapatkan suara sebesar 53,15%, dan Prabowo Subianto mendapatkan 46,85% suara. Dari 34 provinsi, pasangan Joko Widodo – M. Jusuf Kalla mengalami kekalahan di 10 provinsi yakni: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Pemilu presiden 2019 menjadi istimewa selain karena diikuti oleh kandidat yang telah bertarung pada pemilu sebelumnya, juga dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Untuk kali pertamanya dalam sejarah pemilu di Indonesia, akan digelar pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak pada hari yang sama. Pemilu 2019 nanti dikenal juga dengan sebutan “Pemilu Lima Kotak” karena pada saat yang sama dilakukan pemilihan presiden, pemilihan DPR-RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota dan pemilihan DPD. Dari sisi kontestasi, nuansa kompetisi pasangan calon diperkirakan akan kuat karena adanya pengaruh antara politik lokal di pilkada serentak 2018 dengan preferensi politik publik di tingkat nasional. Studi yang dilakukan CSIS (2018) menunjukkan ada pengaruh antara psikologi pemilih di tingkat lokal dalam pelaksanaan pilkada tahun 2018 dengan psikologi pemilih di tingkat pusat menjelang pemilu nasional serentak 2019. Survei yang dilakukan CSIS di lima provinsi pada Pilkada 2018 lalu memperkirakan kontestasi ketat antara Jokowi dan Prabowo diperkirakan akan terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Pada gelombang Pilkada sebelumnya (2017), variasi kontestasi yang menyedot perhatian publik di tingkat nasional, terjadi di Pilkada DKI Jakarta.

Kontestasi Pilkada DKI Jakarta disinyalir banyak pihak sarat dengan mobilisasi pemilih melalui politik identitas, terutama setelah terjadinya gerakan massa aksi 212. Kekhawatiran terhadap berkembangnya penggunaan politik identitas dalam pemilu 2019 mendatang menjadi perhatian banyak pihak. Kontestasi dan kompetisi politik yang ketat antara kedua calon serta pertumbuhan penggunaan sosial media dari tahun ke tahun menyebabkan kekhawatiran tersebut beralasan. Namun,

---

<sup>1</sup> Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

<sup>2</sup> Survei dilakukan pada 16-30 April 2018 secara serentak di lima provinsi besar, diantaranya, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Jumlah total sample dalam penelitian ini sebesar 5.000 sample, yang tersebar sebanyak 1.000 sample/provinsi. Namun setelah dilakukan verifikasi data, beberapa data tidak valid untuk dianalisis. Dari 1000 sample pada setiap provinsi, data Sumatera Utara yang valid untuk dianalisis sebesar 920 sample, Jawa Barat 956, Jawa Tengah 970, Jawa Timur 920, dan Sulawesi Selatan 898.

<sup>3</sup> Aksi 212 dilakukan pada 2 Desember 2016 yang berpusat di Monumen Nasional, Jakarta.

kekhawatiran penggunaan politik identitas dalam Pemilu 2019, sepertinya tidak sekuat seperti yang terjadi di DKI Jakarta.

Dalam kasus Jakarta, pentingnya faktor identitas (etnis dan agama) dalam membaca perilaku pemilih dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetyawan (2014) dan Gani (2018). Prasetyawan (2014) menunjukkan faktor etnisitas masih berperan penting dalam mempengaruhi perilaku pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2007 dan 2012 meskipun signifikansinya lebih kecil dibandingkan variabel pendidikan dan banjir. Hubungan antara etnisitas dan pilhan menurut Prasetyawan sangat dinamis dan tergantung kepada situasi politik dan waktu pemilihan. Menurut Prasetyawan pada Pilkada DKI 2007, suara Fauzi Bowo tinggi di kelurahan-kelurahan yang banyak dihuni oleh etnis China dan rendah di kelurahan yang didominasi oleh etnis Sunda dan Minangkabau. Sementara pada 2012, peta politiknya mengalami perubahan. Suara Fauzi Bowo kuat di daerah yang dihuni oleh etnis Betawi, Sunda dan Minangkabau, serta rendah di pemilih yang dihuni oleh etnis China dan Batak. Selain etnis, dalam Pilkada 2012, variabel yang signifikan mempengaruhi perilaku pemilih adalah pendidikan dan banjir. Dua variabel ini memberikan pengaruh yang negatif bagi Fauzi Bowo. Suara Fauzi Bowo rendah di daerah-daerah yang terkena banjir dan daerah yang dihuni oleh pemilih dengan pendidikan tinggi.

Penelitian serupa untuk melihat faktor identitas juga dilakukan oleh Gani (2018). Dalam risetnya, ia menunjukkan pentingnya politik identitas dalam hal ini agama sebagai salah satu faktor penentu kemenangan pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Temuan Gani menunjukkan Anis menang di kelurahan-kelurahan dengan kantong pemilih muslim yang besar dan di daerah padat penduduk. Sementara suara Ahok rendah di daerah dengan populasi pemilih muslim yang besar dan suara Ahok tinggi di daerah-daerah di basis Jokowi pada Pilkada 2012.

Kekhawatiran sejumlah kalangan terhadap potensi penggunaan politik identitas dalam Pemilu 2019 tentu beralasan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2018 yang mengidentifikasi sejumlah daerah yang berpotensi menimbulkan kerawanan dalam Pilkada 2018 mendatang. IKP menggunakan pembobotan pada tiga dimensi, yaitu partisipasi, kontestasi, dan penyelenggaraan. Skor kerawanan dibagi dalam tiga kategori, rendah (0-1,99); sedang (2,00 – 2,99) dan tinggi (3,00 – 5,00). Dari 17 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2018, 5 kerawanan tertinggi adalah Papua (skor 3,41), Maluku (skor 3,25), Kalimantan Barat (skor 3,04), Sumatera Utara (skor 2,86) dan Sulawesi Tenggara (skor 2,81). Berbeda dengan indeks kerawanan sebelumnya, dalam pemilu presiden 2019, Bawaslu memasukkan dimensi kerawanan SARA sebagai salah satu aspek kerawanan dalam pilkada.

Faktor banyaknya penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2018 juga membuat kita harus memberikan perhatian pada kecenderungan politik identitas. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada tahun 2018 lalu, Indonesia mengadakan 171 pemilihan kepala daerah yang terdiri dari 115 di level kabupaten, 39 di kota dan 17 di tingkat provinsi (lihat tabel 1).

**Tabel 1.**  
**Jumlah Pelaksanaan Gelombang Pilkada Serentak tahun 2015-2018**

Tahun	Pilkada Kabupaten	Pilkada Kota	Pilkada Provinsi	Jumlah
2015	224	36	9	269
2017	76	18	7	101
2018	115	39	17	171

Dalam tulisan ini, saya ingin menganalisis dua hal, pertama, kecenderungan pemilih (muslim) di tingkat nasional setelah Pilkada DKI Jakarta dan aksi 212. Kedua, pengaruh elektoral gerakan massa 212 terhadap perolehan suara kandidat presiden atau partai politik dan efektivitasnya.

### **Kecenderungan Pemilih Pasca-212**

Sebelum memproyeksikan penggunaan politik identitas dalam Pemilu 2019 mendatang, tulisan ini ingin memberikan gambaran terlebih dahulu bagaimana politik identitas digunakan dalam kontestasi politik di tingkat lokal serta bagaimana pengaruhnya.

Konteks politik dan keragaman masyarakat di tingkat lokal yang berbeda-beda membuat gejala dan kecenderungan yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta tak sepenuhnya bisa menjelaskan kondisi politik di daerah lainnya. Duplikasi model kampanye di Pilkada DKI Jakarta juga tak sepenuhnya bisa dilakukan di daerah lain. Dalam Pilkada Serentak 2018 lalu, Fernandes (2018) menunjukkan bahwa isu mengenai dinasti politik dan kinerja petahana sangat mempengaruhi pilihan politik masyarakat pada level provinsi dibandingkan isu politik identitas. Di beberapa daerah, sejumlah calon yang memiliki afiliasi dengan dinasti politik mengalami kekalahan, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Sejumlah petahana juga mengalami kekalahan seperti di Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku. Isu politik identitas relatif tidak menjadi isu sentral di setiap daerah, kecuali pada batas-batas tertentu di Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Papua seperti temuan CSIS (2018) dan *Institute for Policy Analysis of Conflict* (2018).<sup>4</sup> Dalam penelitian CSIS (2018), isu perbuatan *musyrik* yang dialamatkan pada salah seorang calon mempengaruhi penurunan suara pasangan tersebut dalam pilkada.

Secara umum, pada pilkada di tingkat provinsi, isu kinerja pemerintahan dan dinasti lebih kuat pengaruhnya dibandingkan isu politik dinasti. Selain itu, faktor perbedaan platform antara partai-partai koalisi yang berbeda juga menjadi penghalang munculnya politik identitas secara kuat. Dataset CSIS (2018) tentang pola koalisi di tingkat lokal menunjukkan tingginya persilangan koalisi antara partai berbasis nasionalis dengan partai berbasis agama dan antara partai pemerintahan dengan oposisi. Bila dilihat dari sisi frekuensi, ada kecenderungan partai oposisi lebih banyak

<sup>4</sup> Lihat Politik Identitas dan Akar Konflik dalam Pilkada Serentak: Potensi dan Mitigasi Konflik, Centre for Strategic and International Studies, 2018.

<sup>5</sup> Lihat "Update on Local Election Results in West Kalimantan and Papua, IPAC Report No. 50, 16 August 2018, Institute for Policy Analysis of Conflict dan "The West Kalimantan Election and The Impact of The Anti-Ahok Campaign, IPAC Report No. 43, 21 February 2018, Institute for Policy Analysis of Conflict.

berkoalisi dengan partai oposisi lainnya di banyak daerah—dibandingkan dengan koalisi partai pemerintah. Gerindra misalnya, lebih banyak berkoalisi dengan PAN dan PKS. Sementara koalisi PDIP lebih variatif, paling banyak berkoalisi dengan Demokrat dan PPP dan paling rendah berkoalisi dengan PKS dan Gerindra.

Dibandingkan efek politik elektoral terhadap naik atau turunnya suara pasangan calon atau partai, efek massa aksi 212 justru terjadi pada menguatnya konservatisme di kalangan pemilih. Mietzner dan Muhtadi (2018) menemukan bahwa sebelum mobilisasi aksi 212 justru konservatisme agama di kalangan pemilih muslim tengah mengalami penurunan dalam rentang 2010 sampai 2016.

Dalam publikasi yang berbeda, Mietzner, Muhtadi dan Halida (2018) menjelaskan mobilisasi (212) mempengaruhi terjadinya peningkatan dukungan terhadap agenda-agenda politik Islam. Temuan survei LSI seperti dikuti oleh Mietzner, dkk juga menunjukkan adanya kenaikan terhadap rata-rata penolakan terhadap non-muslim dalam mengisi jabatan politik dari 42.3% pada 2016 menjadi 49.6% pada 2017. Mobilisasi aksi 212 juga didorong karena sebelumnya adanya penolakan pemilih terhadap non-muslim dalam politik dan penolakan terhadap hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Dari sisi pendidikan dan pendapatan, Mietzner, Muhtadi dan Halida (2018) menemukan tidak ada hubungan antara dukungan kepada ide-ide islamis dengan pendidikan dan pendapatan.

### **Efek Elektoral Massa Aksi 212**

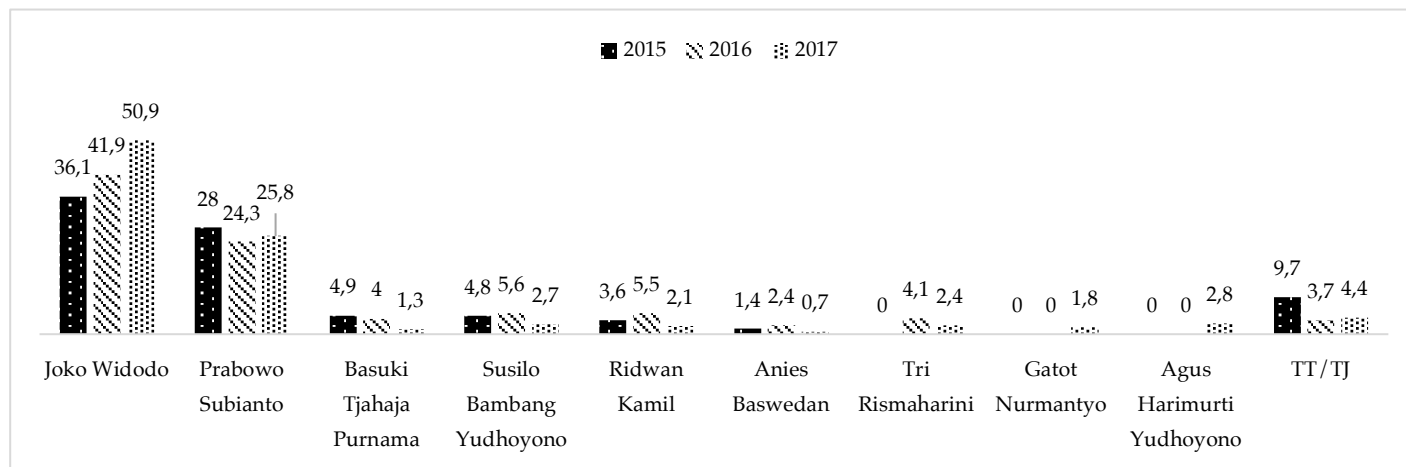
Politik identitas mengalami penguatan bila kontestasi antar-kandidat cukup kuat terutama di daerah dengan komposisi latar-belakang pemilih yang berimbang, baik dari sisi agama, suku, atau ras. Bila kondisi tersebut tidak terjadi, biasanya politik identitas tidak akan mengental seperti DKI Jakarta. Pada tingkat nasional, pengaruh Pilkada DKI Jakarta dan Aksi 212 lebih terasa di kalangan elit politik dibandingkan pemilih. Dua peristiwa tersebut mempengaruhi perilaku dan pilihan politik partai dan calon presiden dalam menentukan kebijakan dan sikap politik terkait pilpres. Dari sisi Joko Widodo, pembatalan nama cawapres Joko Widodo dari Mahfud MD menjadi Ma'ruf Amin (Rais Am PB Nahdlatul Ulama) secara cepat, menunjukkan strategi politik untuk merebut suara pemilih muslim. Sementara, dari sisi Prabowo menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan elit politik muslim dalam penentuan cawapres. Elit tersebut tergabung dalam ijtima' ulama GNPf (Gerakan Nasional Penjaga Fatwa) MUI, yang dilaksanakan hingga dua kali.

Dari sisi elektoral, mobilisasi pemilih dalam aksi 212 sejauh ini belum signifikan mempengaruhi suara pemilu menjelang pemilu serentak nasional pada 17 April 2019 mendatang. Lemahnya efek massa aksi 212 terhadap politik nasional tampak pada beberapa indikator. *Pertama*, tidak adanya efek langsung aksi 212 terhadap kenaikan atau penurunan suara pasangan calon. Perolehan suara Joko Widodo misalnya tidak mengalami penurunan setelah digelarnya aksi 212 tersebut, begitu juga suara Prabowo Subianto juga tidak mengalami kenaikan signifikan.

Survei yang dilakukan CSIS pada Agustus 2017 menunjukkan tingkat elektabilitas Jokowi naik sebesar 9% dibandingkan tahun sebelumnya dari 41,9% pada 2016 menjadi 50,9% pada 2017. Sementara suara Prabowo Subianto relatif mengalami stagnasi dari 24,3% pada 2016 menjadi 25,8% pada 2017 (Lihat Gambar 1). Sementara,

survei yang dilakukan Litbang *Kompas* pada 24 September – 5 Oktober 2018 menunjukkan tingkat elektabilitas Jokowi sebesar 52,6% dan Prabowo sebesar 32,7%.

**Gambar 1.**  
Tren Elektabilitas Calon Presiden berdasarkan Survei Nasional CSIS



Bila politik identitas bekerja, Joko Widodo yang sering mendapatkan kampanye negatif mengenai politik identitas harusnya mengalami penurunan suara. Namun, suara Jokowi justru mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya dengan Prabowo Subianto yang dekat dengan kelompok organisasi Islam, juga tidak mendapatkan peningkatan suara secara signifikan, bahkan justru mengalami stagnasi.

*Kedua*, dari sisi distribusi suara pendukung dan massa aksi 212 relatif terdistribusi kepada kedua pasangan calon, baik Jokowi maupun Prabowo. Berdasarkan crosstabulasi data survei CSIS pada April 2018 antara dukungan pemilih terhadap Aksi 212 dengan pilihan calon presiden menunjukkan, pilihan politik pendukung aksi 212 terdistribusi kepada Jokowi dan Prabowo. Jokowi mendapatkan dukungan massa aksi 212 yang lebih tinggi dibandingkan Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Prabowo mendapatkan suara yang lebih tinggi dari pendukung 212 di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Sementara di Provinsi Sulawesi Selatan relatif imbang (Lihat tabel 2). Sebagai catatan, data agregat lima provinsi menunjukkan sebesar 67,9% responden pernah mendengar aksi 212, dari 67,9% yang pernah mendengar, sekitar 60% diantaranya mengaku mendukung aksi tersebut. Sementara dari sisi keikutsertakaan dalam aksi tersebut rata-rata sekitar 6%.

Bila ditarik data berdasarkan agregat di lima provinsi, preferensi politik pendukung massa Aksi 212 masih lebih tinggi ke Prabowo dibandingkan Jokowi. Sebesar 48,5% pendukung massa aksi 212 mengaku mendukung Prabowo dan 41,4% mengaku mendukung Jokowi. Sementara dari sisi karakteristik pendukung, pemilih Jokowi terbelah dua. Data agregat di lima provinsi menunjukkan 48,6 pemilih Jokowi mengaku mendukung aksi 212 dan 51,3% mengaku tidak mendukung aksi 212. Sementara pendukung Prabowo lebih banyak yang mendukung aksi 212. 76,1% pemilih Prabowo mengaku mendukung aksi 212 dan 23,9% tidak mendukung.



**Tabel 2.**  
**Pilihan terhadap Calon Presiden berdasarkan Dukungan terhadap Aksi 212**

	SIKAP	JOKO WIDODO	PRABOWO SUBIANTO	TT/TJ	TOTAL
JAWA TENGAH	Mendukung	55.6%	35.5%	8.9%	100.0%
	Tidak mendukung	74.3%	14.6%	11.1%	100.0%
JAWA TIMUR	Mendukung	49.3%	45.7%	5.0%	100.0%
	Tidak mendukung	65.9%	26.7%	7.4%	100.0%
SUMATERA UTARA	Mendukung	31.1%	54.6%	14.3%	100.0%
	Tidak mendukung	74.9%	19.0%	6.1%	100.0%
JAWA BARAT	Mendukung	32.2%	57.3%	10.5%	100.0%
	Tidak mendukung	52.8%	31.2%	16.1%	100.0%
SULAWESI SELATAN	Mendukung	45.4%	43.8%	10.8%	100.0%
	Tidak mendukung	54.7%	33.3%	11.9%	100.0%
	TT/TJ	50.0%	50.0%	0%	100.0%

*Ketiga*, partai-partai yang diasosikan dekat dengan gerakan 212 tidak mendapatkan insentif politik yang besar pasca-Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut tampak dari distribusi pendukung massa 212 yang tersebar ke partai-partai dengan ideologi yang berbeda, baik partai berbasis agama atau nasionalis. Begitu juga partai politik yang mendukung pencalonan Ahok atau mendukung calon lain, sama-sama mendapatkan suara dari massa pendukung 212. Secara agregat, Gerindra dipilih oleh sekitar 22,4% pendukung 212 dan PDIP 16,6%, disusul Golkar (10,8%) sebesar tiga besar.

Sementara saat ditanyakan keikutsertaan dalam Aksi 212, preferensi politiknya menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Hampir 45% peserta Aksi 212 preferensi politiknya adalah Gerindra (29,1%) dan PKS 13,4%). Namun, dari peserta aksi tersebut, pilihan terhadap PDIP juga cukup besar hampir 10%.

### **Mengapa politik identitas tidak efektif?**

*Pertama*, keserentakan waktu pemilihan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Desain pemilu serentak membuat politik identitas tidak dapat bekerja dengan baik, karena isu di pemilu legislatif dan pemilu presiden terbelah. Partai-partai politik yang tidak mempunyai asosiasi langsung dengan calon presiden akan membuat isu yang berbeda dengan capres. Di tingkat lokal, pemilihan isu yang dilakukan caleg diperkirakan juga akan beragam. Caleg biasanya juga akan menyesuaikan dengan konteks sosial politik di tingkat lokal.

Dalam pemilu legislatif, politik identitas diperkirakan tidak terlalu banyak digunakan calon karena beberapa hal, diantaranya komposisi pemilih dan calon anggota legislatif yang beragam dari internal partai politik. Sehingga para caleg akan berhati-hati dalam menggunakan isu-isu dalam kampanye. Selain itu tingkat kontestasi dalam pemilu nanti juga berat, baik di internal dan eksternal. Beberapa perubahan yang terjadi pada 2019 itu diantaranya, terjadinya kenaikan angka *parliamentary threshold* dari 3,5% jadi 4%, penambahan jumlah partai menjadi 16 partai peserta pemilu, dan perubahan mekanisme konversi suara dari *quota hare* menjadi *saint league*. Perubahan-perubahan tersebut membuat caleg akan berusaha membuat strategi kampanye akan menerapkan strategi *catch all* (menyasar semua lapisan pemilih).

*Kedua*, tidak efektifnya penggunaan politik identitas terlihat dari bergesernya isu kedua pasangan menjadi isu-isu ekonomi dan pembangunan dalam kampanye. Bila ini terus konsisten hingga menjelang waktu pemilihan, diharapkan akan mengurangi munculnya potensi penggunaan isu-isu berbasis identitas. Saat ini, berdasarkan temuan survei CSIS, sejak tiga tahun terakhir, isu ekonomi seperti harga sembako, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan, menjadi perhatian utama dan masalah yang dihadapi masyarakat di tingkat bawah.

*Ketiga*, dalam pemilu legislatif, perubahan pilihan terjadi berdasarkan preferensi ideologis pemilih. Bila pemilih pada pemilu sebelumnya memilih partai berbasis agama, bila dia mengubah pilihannya dalam pemilu berikutnya, kecenderungannya akan kembali memilih partai berbasis agama. Begitu juga dengan preferensi pemilih partai berbasis nasionalis. Artinya, penggunaan isu-isu agama hanya efektif bagi pemilih partai-partai berbasis agama. Sementara proporsi dukungan kepada partai agama lebih rendah dibandingkan partai berbasis nasional. Survei CSIS pada tahun 2017 menunjukkan sebesar 91.4% pemilih mengaku akan memilih partai nasionalis pada pemilu 2014 tahun sebelumnya tetap memilih partai nasionalis pada saat survei dilakukan Agustus 2017. Hanya sekitar 2.3% yang berpindah kepada partai agama. Sementara, tingkat loyalitas di kalangan pemilih partai berbasis agama tidak sekuat pemilih partai nasionalitas. Pemilih partai berbasis agama lebih rentan mengalami perpindahan. Data menunjukkan sebesar 75.7% pemilih partai berbasis agama kembali tetap memilih, dan sebesar 17.1% bermigrasi ke partai berbasis nasionalis (Lihat tabel 3).

**Tabel 3.**  
Migrasi Suara Pemilih dari Pemilu 2014 dan Pilihan pada Survei 2017

Karakteristik Partai	Nasionalis	Agama	Lainnya	TT/TJ	Total
Partai berbasis nasionalis	91.4%	2.3%	1.1%	5.2%	100.0%
Partai berbasis agama	17.1%	75.7%	2.9%	4.3%	100.0%
Tidak/belum memilih	49.0%	10.2%	17.3%	23.5%	100.0%
TT/TJ	27.3%	12.1%	3.0%	57.6%	100.0%

Keempat, dari sisi pemilih, di tingkat nasional terjadi konsistensi pilihan berdasarkan aspek-aspek kualitas personal dibandingkan pilihan berdasarkan faktor-faktor primordial seperti agama dan suku. Dari sisi karakteristik, pemimpin yang dianggap jujur dan anti-korupsi, sederhana dan mampu membawa perubahan dianggap lebih penting dibandingkan pemimpin yang taat beragama.

## Penutup

Lemahnya pengaruh gerakan massa 212 dalam mempengaruhi perilaku pemilih menunjukkan bahwa mobilisasi pemilih berdasarkan isu-isu keagamaan tidak efektif dalam pemilu di tingkat nasional. Kecenderungan lainnya adalah bahwa pilihan publik terhadap pasangan calon, sangat ditentukan oleh faktor kredibilitas, integritas dan program dalam pasangan calon tersebut.

## Tentang Penulis

*Arya Fernandes*

**Arya Fernandes** adalah seorang peneliti di Departemen Politik dan Sosial Politik, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta. Dia telah melaksanakan berbagai survei opini publik masyarakat Indonesia di tingkat lokal maupun nasional semenjak tahun 2009. Survei-survei ini menilai tren nasional dan lokal terkait persepsi pemilih terhadap isu-isu penting seperti *approval rating* kebijakan pemerintah, partisipasi politik, keterlibatan masyarakat sipil dan warga dalam proses politik, serta persepsi publik terhadap kandidat presiden dan partai politik.